

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh antara PAD, DAU, DAK, DBH, dan pembiayaan daerah terhadap belanja daerah serta mendeteksi fenomena *flypaper effect* kabupaten/kota di Indonesia periode tahun anggaran 2021. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat beberapa poin kesimpulan yang terbentuk, yaitu:

- 1) Pengaruh PAD terhadap belanja daerah menghasilkan temuan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2021 menyebabkan adanya perbedaan kabupaten/kota dalam memperoleh PAD. Hampir seluruh pemprov di Indonesia mengalami penurunan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari PAD (Syamsul et al., 2022). Namun, penurunan selama masa pandemi Covid-19 tidak disertai dengan penurunan belanja daerah dikarenakan tingginya kebutuhan daerah guna mempercepat pemulihan pandemi Covid-19. Hal ini mengakibatkan besarnya nilai PAD tidak lagi menjadi acuan besar kecilnya belanja daerah.
- 2) Pengaruh DAU terhadap belanja daerah menghasilkan temuan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Alasannya dikarenakan proporsi DAU yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah itu memiliki kecenderungan bergantung pada DAU atau kemampuan daerah untuk memperoleh sumber pendapatan lain lebih rendah, yang mana memicu pemerintah daerah untuk membatasi pengeluaran belanja daerahnya hanya untuk belanja produktif saja, seperti belanja pegawai dan atau belanja barang dan jasa saja. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang didominasi pendapatan daerahnya dari DAU, tidak mampu untuk membiayai belanja daerah untuk kebutuhan daerah lainnya. Sehingga, semakin besarnya DAU tidak dapat mempengaruhi besarnya belanja daerah.
- 3) Pengaruh DAK terhadap belanja daerah menghasilkan temuan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Menurut Fadilah &

Helmayunita (2020), regulasi DAK tidak serinci regulasi pengalokasian DAU dan DBH menyebabkan pemerintah daerah tidak memiliki kepastian awal mengenai besaran DAK yang diberikan. Daerah yang didanai oleh DAK lebih sedikit menandakan bahwa kegiatan khususnya sedikit, tetapi tidak menggambarkan bahwa kebutuhan belanja daerah tersebut juga sedikit. Sehingga, kenaikan/penurunan DAK tidak mempengaruhi kenaikan/penurunan belanja daerah.

- 4) Pengaruh DBH terhadap belanja daerah menghasilkan temuan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Pada 2021 di mana pemulihan covid-19 masih berlangsung, insentif pajak dan relaksasi pajak yang diberikan pemerintah menekan besaran DBH di berbagai daerah. Hal ini berdampak mengurangi DBH pada wilayah yang lebih banyak memperoleh DBH pajak. Namun, kebutuhan belanja daerah, terutama pada masa pandemi Covid-19 tetap tinggi yang menimbulkan penurunan DBH tidak mempengaruhi penurunan pada belanja daerah.
- 5) Pengaruh pembiayaan daerah terhadap belanja daerah menghasilkan temuan bahwa pembiayaan daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Adanya pembiayaan daerah membuat pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mencukupi belanja guna menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan publik. Semakin besar net pembiayaan daerah, memperbesar juga alternatif sumber pendanaan belanja daerah dari pos pembiayaan daerah.
- 6) Deteksi *flypaper effect* pada 467 kabupaten/kota di Indonesia pada penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya fenomena *flupaper effect* di Indonesia dari dana perimbangan. Namun, ditemukan mekanisme pendanaan baru yang digunakan pemerintah daerah yaitu digunakannya pembiayaan daerah sebagai alternatif dalam membiayai kebutuhan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Semakin besar nilai dari pembiayaan daerah menandakan bahwa pemerintah mampu menutup defisit anggaran apabila belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerahnya yang memicu besarnya anggaran belanja daerah.

5.2 Saran

Atas kesimpulan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, terdapat beberapa saran, sebagai berikut:

- 1) Bagi pemerintah daerah, penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi informasi dan memberikan fakta terkait komponen pendapatan dan pendanaan daerah yang mempengaruhi belanja daerah. Penelitian berharap dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kembali pengelolaan belanja daerah agar pemerintah daerah mendahulukan untuk menghasilkan pendapatan asli daerahnya sendiri terlebih dahulu dan tidak bergantung pada pendapatan dari sumber lain agar pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Hal ini digambarkan dengan rata-rata PAD kabupaten/kota di Indonesia yang hanya sebesar 12,6% dari total pendapatan daerah yang berarti bahwa sebesar 87,4% bersumber dari pendapatan lain selain PAD. Otonomi daerah yang telah berlangsung lebih dari satu dekade seharusnya mampu memicu perkembangan kabupaten/kota menuju kemandirian fiskal dengan membiayai kebutuhan belanja daerah yang didominasi berasal dari PAD.
- 2) Penelitian selanjutnya juga dapat mendefinisikan kembali fenomena *flypaper effect* yang bersumber dari pendanaan lain selain dana perimbangan karena ditemukan adanya mekanisme pendanaan baru, yaitu pembiayaan daerah.